

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Kendal

Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kendal terletak pada 109°40' -110°18' Bujur Timur dan 6°32' - 7°24' Lintang Selatan. Dengan luas wilayah 1315,43 km² yang terdiri dari 1.002,23 km² untuk wilayah daratan dan 313,20 km² untuk wilayah lautan. 313,20 km² untuk wilayah perairan Kabupaten Kendal terbagi menjadi 20 kecamatan. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di sebelah timur, Kabupaten Temanggung di sebelah selatan, dan Kabupaten Batang di sebelah barat. Jarak terjauh Kabupaten Kendal dari barat ke timur adalah 40 kilometer, sedangkan dari utara ke selatan adalah 36 kilometer. Kabupaten Kendal terletak 25 kilometer di sebelah barat Kota Semarang. Kendal dilalui oleh Jalan Pantura (jalan negara) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) wilayah dataran, yaitu dataran rendah (pantai) dan dataran tinggi (pegunungan). Bagian utara Kendal dapat berupa zona rawa dengan ketinggian antara - 10 meter di atas permukaan laut, yang meliputi kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu. Kecamatan Kendal memiliki 41 desa. 0 km² garis pantai, yang membentang di 25 kota, khususnya Mororejo, Wonorejo (Kecamatan Kaliwungu), Purwokerto, Turunrejo (Kecamatan Brangsong), Banyutowo, Karang Sari, Bandengan, Balok, Kalibuntu (Kecamatan Kendal), Wonosari, Kartika Jaya, Pidodo Wetan, Pidodo Kulon (Kecamatan Patebon), Margorejo, Korowelang Anyar, Korowelang Kulon, Kalirandu Gede, Kali Ayu, Juwiring, Sidomulyo (Kecamatan Cepiring), Kali Rejo, Tanjung Mojo, Jungsemi, Sendang Kulon (Kecamatan Kangkung), dan Sendang Sikucing, Gempol Sewu (Kecamatan Rowosari). Sementara itu, bagian selatan daerah ini merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 10 - 2.579 meter di atas permukaan laut, yang meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo,

Patean, Boja, Limbanga, Singorojo, Kaliwungu Selatan.

2.2 Key Performance Indicator (KPI) dalam Pemerintahan

Key Performance Indicator (KPI) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu entitas atau individu dalam mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam sektor pemerintahan, KPI diimplementasikan sebagai standar yang digunakan untuk mengukur kinerja aparatur negara, termasuk kepala desa. KPI menjadi instrumen yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan, karena indikator-indikator ini mampu memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja kepala desa.

KPI biasanya disusun berdasarkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang pemerintah, serta mencerminkan prioritas dan kebutuhan lokal. Di Kabupaten Kendal, indikator kinerja ini diterapkan untuk mengukur seberapa baik kepala desa mengelola anggaran, melaksanakan program pembangunan desa, dan berinteraksi dengan masyarakat. Indikator yang umum digunakan mencakup aspek pengelolaan anggaran, transparansi dalam pelaksanaan program, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, dan akuntabilitas dalam pelaporan.

Penggunaan KPI diharapkan dapat mendorong kepala desa agar lebih bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya indikator yang spesifik, Inspektorat dapat melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan terukur, sehingga praktik korupsi dapat diminimalisir. Selain itu, KPI juga menjadi dasar untuk memberikan sanksi atau penghargaan berdasarkan kinerja, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

2.3 Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Kendal

2.3.1 Inspektorat Kendal

Inspektorat Kabupaten Kendal adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pemeriksaan internal dalam rangka memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program serta kegiatan di lingkup pemerintahan Kabupaten Kendal. Tugas utamanya adalah

membantu Bupati Kendal dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan pemeriksaan pada seluruh perangkat daerah, yang mencakup dinas, badan, kecamatan, dan kelurahan. Lembaga ini menjalankan peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, yang meliputi pencegahan dan penanganan tindak korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif. Inspektorat Kabupaten Kendal juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Inspektorat berfokus pada penerapan sistem pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan Key Performance Indicators (KPI), dan metode pengawasan yang proaktif, seperti audit, evaluasi, monitoring, dan pemantauan berkelanjutan atas implementasi kebijakan daerah. Dengan menggunakan KPI, Inspektorat dapat mengevaluasi kinerja organisasi secara objektif, mengidentifikasi potensi penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan agar seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kendal dapat bekerja secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

2.3.2 Struktur Organisasi

Tabel 2. 1 Stuktur Organisasi

No	Nama	Jabatan
1	Lilik Rahmawati, S.Tr.I.P.	Ahli Pertama - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
2	Elfrida Tri Farah Anindita, S.Tr.I.P.	Ahli Pertama – Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
3	Rini Utami, S.H., M.A.	Sekretaris Inspektur Daerah
4	Muhammad Nur Fathoni, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda
5	Udjang Purwanto, Se	Analisis Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
6	Yuliana Kurniawati, S.E.	Perencana Ahli Muda

7	Tri Mulyono, S.Ak.	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
8	Irfan Nuzul Rachman, S.Tr.Ip	Analisis Perencanaan
9	Dwi Budiarti, S.Sos	Kepala Subbagian Administrasi Umum Dan Keuangan
10	Slamet	Petugas Keamanan
11	Suyoso	Petugas Keamanan
12	Moh Junaidi	Pengadministrasi Umum
13	Esti Istiyanti, S.E.	Bendahara
14	Edi Mulyono	Pengemudi
15	Susianti, S.Sos.	Pengelola Gaji
16	Cindy Maulina Hardianti, A.Md.	Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor
17	Suwaibah, S.Sos	Auditor Muda
18	Achmad Budiman, Se	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Muda
19	Muh Yuli Maskur, S.H.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Madya
20	Nur Chasanah, S.Si.T.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Muda
21	Mohamad Suyuti, S.E., M.M.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Madya
22	Indrianto Adi Nugroho, S.T.	Auditor Madya
23	Dyah Widyastuti, S.E., M.M.	Auditor Madya
24	Ardyan Iqbal Ratnandar Putra, S.Ak	Auditor Pertama
25	Anggoro Pramubinawan	Auditor Madya
26	Christiana Simamora, S.Sos., M.Si	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Madya
27	Istri Kusriani, S.T.	Auditor Muda
28	Dina Hapsari Sm, S.Ap	Pengawas Penyelenggara Urusan

		Pemerintahan Daerah Muda
29	Arif Setiyono, S.Kom.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Pertama
30	Deanti Banar Suseno, S.E.	Auditor Pertama
31	Juweni, S.Sos., M.Si.	Inspektur Pembantu Iii
32	Akmal Basir	Auditor Madya
33	Dwi Sulistyantoro Saputro, S.T., M.M.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Madya
34	Dhena Arief Kurniawan, S.E.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Muda
35	Musdalifah, S.Sos.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Pertama
36	Doni Priyo Utomo, S.E., M.M.	Auditor Muda
37	Dita Ratnasari Suyono, S.E.	Auditor Pertama
38	Dwi Jatmiko Andhy Kusuma, S.T.,M.M.	Inspektur Pembantu Iv
39	Bambang Surono, S.H., M.M.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Madya
40	Akhmad Ansori, S.E.	Auditor Madya
41	Mastur, S.E., M.M.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Madya
42	Achmad Ashar, S.Sos	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Muda
43	Helmi Wakanno, Se	Auditor Muda
44	Adi Suyono, S.E.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Muda
45	Claudia Cintya Prilimananda, S.E	Auditor Pertama
46	R Bayu Adhi Pamungkas, S.E.	Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus

47	Suparjono, S.T., M.M.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Madya
48	Tomi Priyadi, S.Sos.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Pertama
49	Suryanto, S.Ap	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Madya
50	Aji Setyawan, S.E, M.M.	Auditor Madya
51	Kuat Sugiyanto, S.Sos., M.Si.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Muda
52	Dyna Puspasari, S.E., S.H.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Pertama
53	Ely Nur Fitria, S.E.	Auditor Muda
54	Eko Prasetyo Tunggul Negoro, S.E.	Auditor Madya
55	Rizki Febrian Nasetiyo, S.E.	Auditor Pertama

2.4 Peran Inspektorat Kabupaten Kendal dalam Pengawasan Pemerintahan Desa

Inspektorat Kabupaten Kendal memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengendalian tata kelola pemerintahan di daerah, termasuk pemerintahan desa. Sebagai lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan audit, Inspektorat bertanggung jawab untuk memeriksa kinerja aparatur desa dan memastikan bahwa mereka menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain melakukan audit keuangan, Inspektorat juga bertugas untuk mengevaluasi kinerja kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Dalam konteks pengawasan berbasis KPI, Inspektorat berperan dalam menetapkan indikator-indikator kinerja yang sesuai dengan tujuan pemerintahan daerah. Inspektorat Kabupaten Kendal menentukan berbagai indikator yang

relevan, seperti efektivitas penggunaan anggaran, kepatuhan terhadap peraturan, serta hasil program yang dicapai. Dengan indikator ini, Inspektorat dapat melakukan evaluasi yang lebih objektif terhadap kinerja kepala desa dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

Sebagai lembaga yang berperan untuk menjaga integritas pemerintahan, Inspektorat juga melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada kepala desa mengenai pentingnya menjalankan prinsip *good governance*. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan kepala desa dapat memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam menjalankan tugas. Inspektorat juga menindaklanjuti hasil audit dan evaluasi KPI dengan mengadakan pertemuan berkala dengan kepala desa untuk memberikan umpan balik, sehingga pengelolaan pemerintahan desa dapat terus ditingkatkan.

2.5 Implementasi KPI oleh Inspektorat Kabupaten Kendal dalam Mencegah Korupsi Kepala Desa

Korupsi di tingkat desa menjadi isu yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor seperti pengelolaan keuangan yang tidak transparan, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan desa. Praktik korupsi ini sering terjadi dalam bentuk penggelapan dana desa, penyelewengan anggaran pembangunan, atau penyalahgunaan wewenang kepala desa. Misalnya, beberapa kepala desa cenderung memanfaatkan minimnya akses masyarakat terhadap informasi publik untuk menyembunyikan penggunaan dana yang tidak sesuai. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi penyebab utama korupsi di desa. Sebagian besar masyarakat desa enggan atau tidak memiliki kapasitas untuk menantang kebijakan yang dibuat oleh aparatur desa, sehingga peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan semakin besar.

Dampak dari korupsi di desa sangat signifikan, mulai dari terhambatnya pembangunan infrastruktur lokal, menurunnya kualitas layanan publik, hingga merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, peran

pengawasan seperti yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal menjadi krusial. Dengan integrasi sistem pengukuran kinerja seperti KPI, Inspektorat dapat memberikan evaluasi yang obyektif terhadap kinerja desa dan merekomendasikan perbaikan. Selain itu, pendekatan berbasis *good governance* yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat perlu terus diterapkan untuk mengurangi potensi korupsi di tingkat desa secara sistemik.

Implementasi KPI oleh Inspektorat Kabupaten Kendal merupakan langkah yang strategis dalam upaya mencegah praktik korupsi di tingkat desa. Melalui KPI, Inspektorat memiliki alat yang dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh kepala desa mematuhi prinsip-prinsip *good governance* dan menjalankan tugas sesuai dengan aturan. Dengan adanya pengukuran yang jelas dan obyektif, Inspektorat dapat mendeteksi secara dini adanya penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan desa.

KPI yang diterapkan oleh Inspektorat mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan desa, seperti akuntabilitas anggaran, keterbukaan dalam pelaksanaan program, partisipasi masyarakat, dan kualitas pelayanan publik. Dengan mengukur kinerja berdasarkan indikator-indikator ini, Inspektorat dapat menilai apakah kepala desa sudah menjalankan tugas dengan baik atau belum. Jika ditemukan adanya kinerja yang kurang memuaskan atau indikasi penyimpangan, Inspektorat akan memberikan sanksi dan peringatan, atau bahkan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Implementasi KPI diharapkan dapat memberikan efek jera kepada kepala desa yang cenderung melakukan penyimpangan, karena hasil evaluasi KPI akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengangkatan atau pemberhentian kepala desa. Selain itu, KPI juga berperan dalam mendorong kepala desa untuk lebih transparan dalam menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan, sehingga masyarakat dapat menilai secara langsung kinerja kepala desa. Dalam jangka panjang, diharapkan penerapan KPI ini dapat membentuk budaya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari praktik-praktik korupsi.

2.6 Tantangan dalam Implementasi KPI di Kabupaten Kendal

Meskipun memiliki manfaat yang besar, implementasi KPI di Kabupaten Kendal juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan pengawasan berbasis KPI. Inspektorat Kabupaten Kendal perlu memiliki staf yang terlatih untuk dapat mengukur dan menganalisis data kinerja kepala desa secara akurat. Selain itu, kepala desa dan perangkat desa lainnya juga memerlukan pemahaman yang cukup tentang konsep KPI agar mereka dapat bekerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Kendala lainnya adalah adanya resistensi terhadap perubahan dari beberapa pihak, terutama dari aparat desa yang merasa bahwa KPI adalah tambahan beban administratif. Hal ini memerlukan pendekatan yang bijaksana dari Inspektorat untuk memberikan pemahaman bahwa KPI adalah alat yang bermanfaat bagi tata kelola pemerintahan desa. Inspektorat dapat mengatasi hal ini dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi yang memadai, sehingga kepala desa dan perangkatnya dapat menerima KPI sebagai bagian dari sistem evaluasi yang bermanfaat bagi pengelolaan desa.

Tantangan teknologi juga menjadi kendala lain yang perlu diatasi. Penerapan KPI yang optimal memerlukan sistem informasi dan teknologi yang mendukung agar data kinerja dapat dikumpulkan dan dianalisis dengan cepat dan akurat. Dalam hal ini, Inspektorat perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah untuk mengembangkan infrastruktur teknologi yang memadai agar implementasi KPI di Kabupaten Kendal dapat berjalan efektif dan efisien.

2.7 Kondisi Desa Ngampel Weten

Ngampel wetan merupakan salah satu dari 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Terdiri dari 3 desa, yaitu Krajan 1, Krajan 2 dan Dukusari yang terbagi dalam 3 RW dan 17 RT. Sebagian besar penduduknya adalah peternak dengan mata pencaharian agraris, 2/3 wilayahnya merupakan daerah agraris (daerah persawahan) yang terbagi dalam 5 bagian, yaitu bagian Pelurahan, bagian Ploso, bagian Doro 1, bagian Doro 2, dan bagian Memple. Di

tengah-tengah masa Sunan Ampel menyebarkan agama Islam di wilayah Kendal, Sunan Ampel pernah beristirahat di sebuah tempat yang sampai saat ini masih menjadi petilasan (Kota Ngampel Kulon, Lokalisasi Ngampel, Daerah Kendal). Ketika hendak melakukan doa, beliau tidak menemukan sumber air untuk mandi, sehingga Sunan Ampel berjalan mencari air (sumber air) dengan gigih, akhirnya beliau menemukan sumber air dan mandi di tempat tersebut. Pada saat itu sendang tempat Sunan Ampel berwudlu diberi nama Sendang Ngampel hingga saat ini sendang tersebut masih ada, tepatnya di Kota Ngampel Wetan, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Kendal dengan alas kaki yang masih berbentuk seprai yang digunakan untuk berwudlu meskipun tidak terawat. Setelah Desa Ngampel Wetan secara resmi diakui oleh Kadipaten Kendal, maka letak & posisi Desa semakin strategis sebagai akibatnya tersusun Pemerintahan Desa yg terdiri menurut Kepala Desa bersama perangkatnya & berikut susunan Pemerintahan Desa Ngampel Wetan. Demikian Penuturan babad Tanah Desa Ngampel Wetan pada rangkuman sejarah.

Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Ngampel Wetan telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam berbagai bidang, terutama infrastruktur dan pelayanan publik, berkat program pembangunan desa yang dicanangkan oleh pemerintah daerah. Meski demikian, desa ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pengelolaan anggaran yang efektif, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Saat ini, Desa Ngampel Wetan juga menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Sebagaimana desa-desa lainnya di Kabupaten Kendal, Ngampel Wetan juga menjadi sasaran pengawasan oleh Inspektorat, terutama dalam hal pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang diterima desa dikelola dengan akuntabilitas dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Melalui penerapan *Key Performance Indicators* (KPI) oleh Inspektorat Kabupaten Kendal, kinerja kepala desa dan perangkat desa Ngampel Wetan dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif. Sistem pemantauan ini menjadi penting

mengingat kebutuhan masyarakat akan pemerintahan desa yang transparan dan responsif semakin meningkat. Penggunaan KPI di Desa Ngampel Wetan diharapkan mampu menekan potensi penyalahgunaan wewenang dan mengarahkan pengelolaan keuangan desa agar lebih akuntabel dan tepat sasaran. Selain itu, dengan adanya evaluasi kinerja berbasis KPI, perangkat desa diharapkan dapat termotivasi untuk bekerja lebih profesional dan berfokus pada pelayanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, kondisi terkini Desa Ngampel Wetan menunjukkan adanya upaya yang positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas. Dengan pengawasan yang efektif dan penerapan KPI yang konsisten, diharapkan Desa Ngampel Wetan dapat menjadi contoh penerapan *good governance* di tingkat desa serta berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Kendal secara keseluruhan.